



# *RENCANA STRATEGIS*

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

**TAHUN 2023 - 2026**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SORONG

---



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Periode Tahun 2023 – 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini dapat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026. Dokumen Renstra ini dibuat untuk memberikan arah, tujuan, maupun sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sorong selama kurung waktu 4 (empat) tahun.

Dalam Renstra ini dimuat seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, secara bertanggung jawab dan Akuntabel serta berhasil guna Pembangunan Ketahanan Pangan untuk masyarakat Kabupaten Sorong.

Dan Dokumen Renstra ini juga menjadi acuan untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong.



Dalam penyusunan Renstra ini tentu masih terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya dapat menyempurnakan pembuatan Renstra selanjutnya.

Aimas, Januari 2023

Kepala Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong,



**Dorce Kalami, SIP.,MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196404061986032025



**DAFTAR TABEL**

|  | HAL |
|--|-----|
| 1. Tabel 1.1 Sumber Daya Perangkat .....   | 12  |
| 2. Tabel 1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                    | 14  |
| 3. Tabel 3.1 Perwujudan Visi RPJMD Kab. Sorong 2017-2022 .....                           | 18  |
| 4. Tabel 3.2 Penjabaran Turunan Visi ke dalam Misi .....                                 | 19  |
| 5. Tabel 6.1 Penjabaran OPD ke dalam Program .....                                       | 23  |
| 6. Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan<br>Tahun 2023-2026 ..... | 24  |



## DAFTAR ISI

|  | HAL       |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....   | i         |
| DAFTAR TABEL .....   | ii        |
| DAFTAR ISI .....   | iii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum.....  |           |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 2         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 3         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>  | <b>5</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....  | 5         |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....  | 12        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 14        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah .....                     | 16        |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT<br/>DAERAH .....</b>                   | <b>17</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Perangkat Daerah ..... | 17        |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah Terpilih .....    | 17        |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....   | 19        |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis .....         | 20        |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....  | 20        |



|          |   |    |
|----------|---|----|
| BAB IV   | TUJUAN DAN SASARAN .....                              | 21 |
| 4.1      | Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah .....         | 21 |
| 4.2      | Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....        | 21 |
| BAB V    | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                     | 22 |
| BAB VI   | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA<br>PENDANAAN ..... | 23 |
| BAB VII  | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....           | 24 |
| BAB VIII | PENUTUP .....   | 26 |

LAMPIRAN :



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berbasis pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat serta berakhirnya masa pemerintahan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Periode tahun 2017 – 2022, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong.

Pelaksanaan suatu kebijakan melalui Program maupun Kegiatan akan berjalan dengan baik, jika dimulai dengan sebuah perencanaan yang mantap. Perencanaan yaitu suatu proses dalam menentukan tindakan dengan keyakinan yang pasti untuk sebuah pelaksanaan program/kegiatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah bagian dari Perangkat Daerah yang diserahkan tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya. Pelaksanaan tugas dimaksud harus dibuat suatu perencanaan tahunan.



Renstra OPD tahun 2023 – 2026 mengacu kepada Perencanaan Pemerintah Daerah (RPD). Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong sebagai dokumen perencanaan Dinas dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sorong sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sorong dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya local.

Berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Periode 2017-2022, maka untuk pelaksanaan pembangunan sampai terpilihnya pemimpin yang baru, Pemerintah Daerah harus membuat Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Demikian juga semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya dibuat sebagai pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sorong.



## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sorong mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2018 – 2022 dengan Landasaan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
4. Peratutan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten /kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I dan Kementrian Negara.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong.
12. Peraturan Bupati Sorong Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan target dan sasaran dalam Pembangunan Ketahanan Pangan.



Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini yaitu:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditentukan.
- b. Menjadi pedoman/acuan kerja OPD dalam melaksanakan Program/Kegiatan.
- c. Sebagai acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010, tentang sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disesuaikan dengan kondisi OPD.



Adapun penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, sebagai berikut :

**BAB. I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisa.

**BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang peran pelayanan OPD dalam menjalankan tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB. III. PERMASALAHAN & ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi identifikasi permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup dan Penentuan Isu – isu Strategis.

**BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB. V. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN**

**BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP



## BAB. II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tanggal 29 Agustus 2016, dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tanggal 27 Desember tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, serta Peraturan Bupati Sorong Nomor : 49 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian, terdiri dari :
  - a. Kasub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Kasub Bagian Umum
  - c. Kasub Bagian Keuangan dan Asset



3. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi 3 (tiga) kepala seksi, terdiri dari :
  - a. Kasie Konsumsi Pangan
  - b. Kasie Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  - c. Kasie Pengembangan Pangan Lokal
4. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi 3 (tiga) kepala seksi, terdiri dari :
  - a. Kasie Ketersediaan pangan
  - b. Kasie Sumber Daya Pangan
  - c. Kasie Kerawanan Pangan
5. Bidang Keamanan Pangan membawahi 3 (tiga) kepala seksi, terdiri dari :
  - a. Kasie Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
  - b. Kasie Kelembagaan Keamanan Pangan
  - c. Kasie Pengawasan Keamanan Pangan
6. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi 3 (tiga) kepala seksi antara lain :
  - a. Kasie Cadangan Pangan
  - b. Kasie Harga Pangan
  - c. Kasie Distribusi pangan



Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tanggal 29 agustus 2016, Pengelompokan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten /kota sebagai berikut :

**A. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut :**

1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.



- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- e. Pemantauan, pengawasaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati

## **B. Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas**

### **1. Tugas**

Melakukan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.



## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**1. Tugas dan Uraian Tugas pekerjaan Sub bagian pada Sekretariat**

**a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, meliputi :**

**1) Tugas**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

**2) Uraian Tugas Pekerjaan**

Dalam melakukan tugas, sub bagian perencanaan dan Evaluasi melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c) Melakukan penyusunan anggaran;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- e) Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f) Melakukan pengelolaan data dan kerja sama;



- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

**b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset, Meliputi:**

1) Tugas

Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, sub bagian Keuangan dan Aset melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b) Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c) Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- e) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
- f) Melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.



**c. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub Bagian Umum,**

**Meliputi :**

1) Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi public, serta urusan tata usahaan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, sub bagian Umum melakukan uraian pekerjaan terdiri atas :

- a) Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- b) Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d) Melakukan urusan kepegawaian;
- e) Melakukan urusan hokum dan perundang - undangan;
- f) Melakukan urusan kehumasan;
- g) Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan



h) Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas dan tugas lainnya..

### **C. Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

#### **1. Tugas**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

#### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, kelompok Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan pendukung ketahanan pangan lainnya serta peningkatan kerawanan pangan;



- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan.

**D. Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

**1. Tugas**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.



## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, kelompok Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



## **E. Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**

### **1. Tugas**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, kelompok Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang Konsumsi pangan, Penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang Konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;



- e. Penyiapan pemantapan program di bidang Konsumsi pangan, Promosi Penganekaragaman pangandan Pengembangan Pangan Lokal;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **F. Tugas dan Fungsi Bidang Keamanan Pangan**

### **1. Tugas**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keamanan Pangan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, kelompok Bidang Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan,



- pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi pangan;
  - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi pangan;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi pangan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi pangan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai tenaga aparatur, sebagai berikut :



Tabel 1.1

## Sumber Daya Perangkat Daerah

| No | Nama/NIP  | Jabatan  | Pangkat/Golongan             |
|----|---|--|------------------------------|
| 1  | Dorce Kalami, SIP.,MM<br>196404061986032025             | Kepala Dinas   | Pembina Utama<br>Muda (IV/c) |
| 2  | Ir. Roufrida Panjaitan, M.MA<br>196608101997032001      | Sekretaris   | Pembina Tk.I (IV/b)          |
| 3  | I Wayan Pasek, SE<br>196512301987091018                 | Kabid. Keamanan Pangan                                     | Pembina (IV/a)               |
| 4  | Iriana Yuni Astuti, SP., M.Si<br>196906072002122004     | Kabid. Distribusi dan<br>Cadangan Pangan                   | Pembina (IV/a)               |
| 5  | Arius Sesa, SP<br>197604112010041002                    | Kabid. Konsumsi dan<br>Penganekaragaman Pangan             | Penata Tk.I (III/d)          |
| 6  | Yosina R.S. Kalaibin, S.Hut.,M.Sc<br>198303092010042001 | Kabid. Ketersediaan dan<br>Kerawanan Pangan                | Penata Tk.I (III/d)          |
| 7  | Suarnita Rantelinggi, S.P<br>197406142001112002         | Kasie. Distribusi Pangan                                   | Penata Tk.I (III/d)          |
| 8  | Gunadi Subagiyo, SP., S.Pt<br>196409141987111001        | Kasie. Harga Pangan  | Penata Tk.I (III/d)          |
| 9  | Barsina B. Pattiruhu, S.P<br>197111172002122004         | Kasie. Cadangan Pangan                                     | Penata Tk.I (III/d)          |
| 10 | Ernawati, S.P<br>197006031993032010                     | Kasie. Konsumsi Pangan                                     | Penata Tk.I (III/d)          |
| 11 | Bernard Gifelem, S.P<br>197602122010041001              | Kasie. Ketersediaan Pangan                                 | Penata Tk.I (III/d)          |
| 12 | Pajala, S.P<br>197709202010041001                       | Kasie. Pengembangan<br>Pangan Lokal                        | Penata (III/c)               |
| 13 | Hadiana Tandilondong, A.Md<br>197609052002122009        | Kasie. Promosi,<br>Penganekaragaman dan<br>Konsumsi Pangan | Penata Tk.I (III/d)          |



|    |  |   |                             |
|----|--|---|-----------------------------|
| 14 | Husna Amir, S.Pt<br>198303082006052001               | Kasub Bagian Umum                                 | Penata Tk.I (III/d)         |
| 15 | Frida Marlina Fonataba, SE<br>197305111997122001     | Kasie, Kelembagaan<br>Keamanan P                  | Penata Tk.I (III/d)         |
| 16 | Pither Lonno Ramba, S.Pt<br>197612282010041002       | Kasie. Pengawasan<br>Keamanan Pangan              | Penata Tk.I (III/d)         |
| 17 | Charloth M.P. Osok, S.P., M.MA<br>198512062010042001 | Kasie. Kerjasama dan<br>Informasi Keamanan Pangan | Penata Tk.I (III/d)         |
| 18 | Ronny Juliana Wattimena, S.Pt<br>197205152013062001  | Kasub Bagian Keuangan dan<br>Asset                | Penata (III/c)              |
| 19 | Kristi Yanty Sitania, S.Pt<br>197111082015032001     | Kasub bagian Perencanaan<br>dan Evaluasi          | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) |
| 20 | Laurensius Woju, S.Hut<br>197703162015031001         | Kasie. Distribusi Pangan                          | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) |
| 21 | Merisca Y. Simatupang, S.Pi<br>198007142015032005    | Kasie. Sumber Daya Pangan                         | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) |
| 22 | Junianty Tambing, A.Md<br>198806052011042001         | Bendahara   | Penata Muda (III/a)         |
| 23 | Wahyu Sri Utari, S.P<br>197412172015032001           | Bendahara   | Penata Muda (III/a)         |
| 24 | Eddy Antoh<br>197801292002121006                     | Pengadministrasian<br>Perencanaan dan Program     | Pengatur (II/c)             |
| 25 | Yunariyah, A.Ma.Pd<br>197711042012032001             | Bendahara   | Pengatur (II/c)             |
| 26 | Santi Olivia Tonapa, S.Kom                           | Honorar   | -                           |
| 27 | Andi Ari Hermawan, S.P                               | Honorar   | -                           |
| 28 | Amelia Rumbekwan, S.AN                               | Honorar   | -                           |



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong dikukuhkan sejak Februari 2017 oleh Bupati diberi tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong tahun 2023 – 2026 yaitu :

*“ Tersedianya Pangan yang Cukup Bagi Masyarakat Secara Berkelanjutan ”*

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan berbagai program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD selama 5 (lima) tahun sesuai yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong tahun 2023 – 2026.

Dinas Ketahanan Pangan sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.





Tabel 1.2

## Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022

| NO | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR SUB KEGIATAN                  | VOLUME     | LOKASI  | KETERANGAN |
|----|---|--|--|---|------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                                       | 6          | 11  | 12         |
| 1  | Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan | 1. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah Jenis Komoditi yang Dikembangkan | 2 Kelompok | Distrik Makbon<br>Kampung Malagasi ; Distrik Moisegen<br>Kampung Wonosobo |            |



|   |   |  |  |  |             |   |  |
|---|---|--|--|--|-------------|---|--|
| 2 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1. Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | Persentase Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendukung Kemandirian Pangan | 15 Kelompok | Distrik Klamono, Aimas, Sorong, Mayamuk, Salawati, Mariat, Makbon | Permasalahan yang ditemui saat melakukan Monitoring : Petani masih kurang konsisten dalam melakukan kegiatan |
|   |   |  | 2. Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan  | Frekuensi Pasar Murah yang Dilaksanakan  | 1000 Peket  | Distrik Mayamuk   |  |
|   |   | 2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                | 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal | Jumlah Distrik yang Berpartisipasi dalam Lomba Menu B2SA                               | 32 Distrik  | Kab. Sorong   |  |



|   |                                     |   |  |  |            |   |   |
|---|-------------------------------------|---|--|--|------------|---|---|
|   |                                     |   | 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun   | Jumlah Distrik sebagai Sampel                        | 7 Distrik  | Distrik Aimas, Mariat, Mayamuk, Salawati, Botain, Bagun, Beraur |   |
| 3 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota  | Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan | 18 kali    | Kab. Sorong   | Data Pendukung dari OPD terkait belum tepat waktu |
|   |                                     |   | 2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dala 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Volume Beras yang Distribusikan                      | 12 Ton     | Distrik Salawati Tengah, Distrik Maudus                         |   |
| 4 | Program Pengawasan Keamanan Pangan  | 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar           | 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu  | 1 Jumlah Jenis Komoditas yang Aman Dikonsumsi        | 1 Kelompok | Distrik Mayamuk Kampung Malamai                                 |   |



|  |  |                          |   |   |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|--|--|
|  |  | Daerah<br>Kabupaten/Kota | dan Keamanan<br>Pangan Segar<br>Asal tumbuhan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | 2 | Jenis-Jenis Obat yang<br>Digunakan dalam Budidaya<br>Pertanian |  |  |  |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|--|--|



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya OPD dan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategis yang telah ditentukan akan menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Sistem Pertanian Pangan yang belum maksimal
- b. Dinamika Penduduk, contoh: masih rendahnya pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- c. Keterbatasan Infrastruktur
- d. Fluktuasi Pasar
- e. Keamanan Pangan belum teratasi dengan baik
- f. Distribusi pangan belum merata
- g. Sinergitas dengan Organisasi Pemerintah Daerah terkait masih rendah.

Sedangkan potensi untuk pembangunan Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

- a. Sumber daya lahan (pekarangan)
- b. Sumber daya air
- c. Sumber daya keanekaragaman hayati
- d. Sumber daya manusia (penduduk) yang sebagian besar masih hidup dari sector pertanian
- e. Potensi Teknologi dan Inovasi
- f. Kebijakan Pangan Nasional
- g. Kelembagaan Ketahanan Pangan



## BAB. III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Sorong memiliki sumber daya yang beragam dan memungkinkan untuk Ketahanan Pangan yang berkelanjutan. Namun demikian dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan ada beberapa permasalahan yang dihadapi, untuk itu perlu diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Kurang sinerginya antar instansi dalam mendukung Program Ketahanan Pangan
4. Keterbatasan dana pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat

#### 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra



Perencanaan strategis merupakan hal – hal prioritas yang harus dilakukan melalui pelaksanaan program/kegiatan dari K/L maupun organisasi Perangkat Daerah.

Kementrian Pertanian, melalui Badan Ketahanan Pangan Pusat dengan Visi **“ Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan yang menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani “**

Sedangkan Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berkelanjutan.”**

Dari kedua visi tersebut diatas bahwa tujuan akhirnya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sub kegiatan strategis seperti :

1. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahunan
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota



7. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Penguatan kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
9. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berhasilnya Perencanaan Pembangunan di suatu daerah/wilayah sangat tergantung dari keselarasan atau keserasian dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan kajian lingkungan hidup strategis dengan perencanaan pembangunan dari setiap OPD yang ada wilayah tersebut.

Perencanaan Pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong masih mengacu kepada RUTRK Tahun 2002, karena hingga saat ini untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong dan kajian Lingkungan Hidup Strategisnya masih dalam proses.

Demikian apabila revisi tersebut sudah disahkan, maka disesuaikan dengan rencana Pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan.

### **3.5 Penentuan Isu – isu Strategias**



Penentuan isu strategis sangat penting dilakukan, agar ketika menghadapi masalah dalam pembangunan ketahanan pangan dapat mencari solusinya.

Isu strategis dalam pembangunan ketahanan pangan, yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat menerapkan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) secara kontinue.
2. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
3. Fluktuasi harga pasar yang sering terjadi
4. Keamanan Pangan Segar yang belum terawasi
5. Belum terciptanya pendistribusian ketersediaan pangan secara merata
6. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat masih di bawah rendah.
7. Perubahan Iklim



## BAB. IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Adapun Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 yaitu :

***“ Tersedianya Pangan yang Cukup bagi masyarakat Secara Berkelanjutan***

“

Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Sorong adalah ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan kabupaten sorong sebesar 50,1 % yang berarti bahwa kemampuan menyediakan pangan hanya sebesar 50,1 % dari kebutuhan. Upaya-upaya peningkatan ini harus disadari oleh prinsip perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga proses pembangunan dapat berlanjut.

Dengan menyediakan sarana prasarana serta meningkatnya produksi bahan pokok penunjang ketahanan pangan, tujuan ini dimaksud untuk mendorong produktivitas pangan dalam rangka penguatan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Tujuan ini akan menanggapi isu peningkatan produktivitas sumber pangan local dalam rangka penguatan ketahanan pangan daerah, yang dinilai dengan indikator tujuan adalah persentase ketersediaan pangan utama.

#### 4.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merujuk pada RPD Kabupaten Sorong tahun 2023 – 2026 adalah



## “ Meningkatkan Produktivitas dan Distribusi Pangan Lokal “

Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam pembangunan nasional. Terdapat tiga alasan utama melandasi pentingnya ketahanan pangan yaitu :

1. Akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia;
2. Konsumsi pangan yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu Negara berdaulat.

Distribusi pangan adalah tersedianya pangan dan pasokan pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang perannya sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksanakan secara efektif, efisien dan merata di setiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan masyarakat. Gangguan distribusi pangan dapat berdampak terhadap kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi menurun.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk dapat menjangkau/mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman, kergaman untuk menunjang hidup yang aktif, sehat dan produktif. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan



dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Peranan distribusi pangan yang terjangkau dan merata sepanjang waktu kiranya akan berpengaruh pada peningkatan kses pangan bagi setiap rumah tangga didalam memenuhi kecukupan pangannya.

Sasaran ini akan mendukung tujuan tersedianya pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan dengan indikator kinerja antara lain :

- Jumlah cadangan pangan Kabupaten
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

#### **4.3. Keselarasan antara Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan Sasaran menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran ke dalam pembangunan yang tertuang menjadi sebuah tuntutan yang harus dicapai, maka dapat dijabarkan konsistensi hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut dalam matrik di bawah ini :



Matriks Konsistensi Tujuan dan Sasaran Ketahanan pangan

| TUJUAN  | SASARAN   |
|---|---|
| <p>Tersedianya Pangan yang Cukup Bagi Masyarakat Secara Berkelanjutan</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <p>Persentase Ketersediaan Pangan Utama</p> | <p>Meningkatnya Produktivitas dan Distribusi Pangan Lokal</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten</li><li>- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</li></ul> |



## BAB. V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu.

Strategi Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMADIRIAN PANGAN
2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Arah kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan tertentu, dan berupa kumpulan keputusan.

Adapun arah kebijakan yang dibuat meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Ketersediaan pangan, Keterjangkauan Pangan dan Pemanfaatan Pangan.

- a. Aspek Ketersediaan difokuskan kepada peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal.
- b. Aspek keterjangkauan pangan difokuskan pada stabilisasi pasokan yang beranekaragaman berbasis potensi sumber daya lokal.
- c. Aspek pemanfaatan pangan difokuskan pada percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.



Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran diperlukan sebagai dasar pelaksanaan program perangkat daerah agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tujuan dan sasaran disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran Kabupaten Sorong dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sorong :

**Tabel. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran**

| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>   |
|--|--|---|
| Tersedianya Pangan yang Cukup Bagi Masyarakat Secara Berkelanjutan | Meningkatnya Produktivitas dan Distribusi Pangan Lokal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Produktivitas Potensi SDA Lokal sebagai Kebutuhan Pangan</li><li>2. Pembinaan dan Sosialisasi kepada Masyarakat akan Pemanfaatan Potensi Bahan Lokal</li><li>3. Penyediaan Infrastruktur dan suprastruktur Penunjang Produktivitas Pangan Lokal</li><li>4. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan</li><li>5. Membangun Kerja Sama antara Pihak Petani dengan Pihak Pemerintah atau Investor dalam Peningkatan Produktivitas Pangan Lokal</li></ol> |

**BAB. VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan operasional.

Berdasarkan rumusan kebijakan yang sudah dibuat, ada beberapa Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**Tabel 6.1****Penjabaran Sasaran OPD ke dalam Program**

| <b>SASARAN</b>   | <b>PROGRAM</b>   |
|--|--|
| 1. Meningkatnya pemenuhan bahan pangan pokok sampai ke tingkat rumah tangga dalam jumlah yang cukup. | a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan<br>b. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| 2. Terwujudnya Distribusi Peningkatan Bahan Pangan   | a. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat   |
| 3. Meningkatnya Wilayah Tahan Pangan di Kabupaten Sorong   | a. Penanganan Kerawanan Pangan   |
| 4. Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten Sorong                                 | a. Pengawasan Keamanan Pangan  |
| 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien                                     | a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |

Secara lengkap Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.



## BAB.VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Periode masa Jabatan.

Tabel 7.1

## Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 – 2022

| Sasaran   | Indikator Sasaran                               | Data Capaian Awal Kinerja Perencanaan 2017 | Target Indikator |        |
|---|---|--|------------------|--------|
|   |   |  | 2021             | 2022   |
|   |   |  | Target           | Target |
| Meningkatnya pemenuhan bahan pangan pokok sampai ke tingkat rumah tangga dalam jumlah yang cukup. | 1. Jumlah Cadangan Pangan:<br>- Beras           | 883 ton                                    | 20 ton           | 20 ton |
|   | 2. Persentase Peningkatan Pangan Lokal          | -  | 10 %             | 10%    |
| Terwujudnya Distribusi Peningkatan Bahan Pangan   | Skor PPH Ketersediaan                           |  | 75               | 75     |
|   | Skor PPH Konsumsi                               |  | 70               | 70     |
|   | Persentase Penguatan Cadangan Pangan Perdistrik |  | 16%              | 16%    |

---

|   |   |  |    |    |
|---|---|--|----|----|
| Meningkatnya Wilayah Tahan Pangan di Kabupaten Sorong       | Persentase Peningkatan Wilayah Tahan Pangan |  | 5% | 5% |
| Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Sorong | Presentase Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi |  | 25 | 28 |



## BAB. VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 merupakan aplikasi dari tekad kinerja yang diformulasikan di dalam tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai instansi yang melakukan fungsi koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong tahun 2023 - 2026.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan didalam renstra hendaknya dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dan sebaiknya dikerjakan dengan semangat yang tinggi, hati yang tulus sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik

Kiranya Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sorong untuk tahun 2023 - 2026

MATRIKS RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

RENCANA PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

| 1  | 2  | 3   | 4                              | 5 | Target Indikator |    |    |                | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/Program Prioritas/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan |   |  |                     |   |  |            |   |            |         |             |        |            |                                    |    | 25      |             |   |          |
|--|--|---|--------------------------------|---|------------------|----|----|----------------|--|---|--|---------------------|---|--|------------|---|------------|---------|-------------|--------|------------|------------------------------------|----|---------|-------------|---|----------|
|  |  |   |                                |   | 6                | 7  | 8  | 9              | 10   | 11  | 12   | 13                  | 14  | 15   | Tahun 2023 |   | Tahun 2024 |         | Tahun 2025  |        | Tahun 2026 |                                    | 24 |         |             |   |          |
|  |  |   |                                |   |                  |    |    |                |  |   |  |                     |   |  | 16         | 17  | 18         | 19      | 20          | 21     | 22         | 23                                 |    |         |             |   |          |
| Tujuan   | Sasaran  | Indikator Sasaran                             | Data Capaian Awal Kinerja 2021 |   |                  |    |    | Uraian Program | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Uraian Kegiatan   | Indikator Kegiatan   | Uraian Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan  | Target   | Rp.        | Target  | Rp.        | Target  | Rp.         | Target | Rp.        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |    |         |             |   |          |
|  |  |   |                                |   |                  |    |    |                |  |   |  |                     |   |  |            |   |            |         |             |        |            |                                    |    |         |             |   |          |
| 1  | 2  | 3   | 4                              | 5 | 6                | 7  | 8  | 9              | 10   | 11  | 12   | 13                  | 14  | 15   | 16         | 17  | 18         | 19      | 20          | 21     | 22         | 23                                 | 24 | 25      |             |   |          |
| Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan bahan pangan secara berkelanjutan | Meningkatkan pemenuhan bahan pangan pokok smpa i ke tingkat rumah tangga dalam jumlah yang cukup | Jumlah Cadaan Pangan Kabupaten Sorong (Beras) |                                |   | 20               | 20 | 20 | 20             | 1  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KECAHLATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Bertambahnya lokasi pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kecalatan dan Kemandirian Pangan | 1                   | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persepsi Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendukung Kemandirian Pangan | 1          | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 2          | Distrik | 300,000,000 | 2      | Distrik    | 300,000,000                        | 2  | Distrik | 300,000,000 | - | Ketapang |



|   |   |   |  |       |    |    |    |    |   |                                      |  |                                |   |   |            |             |            |             |            |             |            |             |   |           |
|---|---|---|--|-------|----|----|----|----|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-----------|
|   |   |   |  | 87,82 | 88 | 88 | 88 | 90 |   |                                      |  | 3                              | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan   | Skor PPH Ketersediaan                         | 3 Dok      | 250,000,000 | - | Keta pang |
|   |   |   |  | 61    | 65 | 68 | 70 | 75 |   |                                      | 2  | Jumlah Lokasi Sasaran Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahunan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Skor PPH Konsumsi                             | 3 Dok      | 250,000,000 | - | Keta pang |
| 3 | Meningkatkan wilayah Tahan Pangan                     | Perse ntase Penin gkatan Wilayah Tahan Pangan |  |       |    |    |    |    | 3 | PROGR AM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menin gkatnya Penangan Rawan Pangan      | 1                              | Penangan Kerawan an Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Perse ntase Penangan an Kerawan an Pangan     | 5 Distrik  | 150,000,000 | - | Keta pang |
| 4 | Menin gkatnya Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten | Perse ntase Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi  |  |       |    |    |    |    | 4 | PROGR AM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | Menin gkatnya Pengawasan Keamanan Pangan | 1                              | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelembagaan Keamanan Pangan Segar yang | 1 Kelompok | 250,000,000 | - | Keta pang |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kinerja SKPD |                    |    |  |        |             |        |             |        |             |        |             |      |           |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------------|----|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------|-----------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3            | Admini strasi Umum | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 5%     | 4,000,000   | 5%     | 4,500,000   | 6%     | 5,000,000   | 6%     | 5,000,000   | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                 | 5%     | 22,000,000  | 5%     | 24,000,000  | 5%     | 26,000,000  | 5%     | 28,000,000  | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 15%    | 7,500,000   | 15%    | 8,000,000   | 15%    | 9,000,000   | 15%    | 9,000,000   | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 4  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 15%    | 30,000,000  | 15%    | 30,000,000  | 15%    | 30,000,000  | 15%    | 30,000,000  | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 5  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                 | 15%    | 30,000,000  | 15%    | 30,000,000  | 15%    | 30,000,000  | 15%    | 30,000,000  | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 6  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 5%     | 3,135,000   | 5%     | 3,448,000   | 5%     | 3,800,000   | 8%     | 4,000,000   | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 7  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 5%     | 700,000     | 5%     | 900,000     | 8%     | 1,000,000   | 10%    | 1,000,000   | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 8  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 5%     | 7,000,000   | 5%     | 8,000,000   | 5%     | 9,000,000   | 8%     | 9,000,000   | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 9  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 5%     | 10,000,000  | 5%     | 11,000,000  | 5%     | 13,000,000  | 8%     | 13,000,000  | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 10 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                    | 10%    | 100,000,000 | 10%    | 110,000,000 | 10%    | 120,000,000 | 10%    | 130,000,000 | 100% | Keta pang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                    | 11 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                  | 2 Unit | 250,000,000 | 2 Unit | 250,000,000 | 2 Unit | 300,000,000 | 2 Unit | 300,000,000 | 100% | Keta pang |

